

dalam agenda PBB untuk diperdebatkan sebagai suatu masalah dekolonisasi. Meskipun perimbangan suara di PBB dari tahun ke tahun semakin memihak Indonesia, namun selama masalah tersebut belum dicabut dari agenda sidang maka perjuangan diplomasi tetap belum selesai. Tulisan kedua membahas dimensi internasional masalah Timor Timur serta perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB serta fora internasional lainnya, berjudul "Dimensi Internasional Masalah Timor Timur," oleh Bantarto BANDORO. Bagian terakhir tulisan ini membahas pengaruh masalah tersebut pada hubungan Indonesia-Australia.

Hubungan Indonesia-Australia memang agak tegang sejak timbul masalah Timor Timur. Ketegangan ini menjadi salah satu ganjalan bagi tercapainya kompromi dalam perundingan tentang penetapan batas landas kontinen kedua negara mengenai "Timor Gap." Di samping hambatan politis, perundingan tentang penetapan batas maritim tersebut terhambat pula oleh masalah-masalah yang bersifat ekonomis, teknis dan yuridis. Kesemuanya itu dibahas oleh Asnani USMAN dalam tulisannya yang berjudul "Timor Gap dalam Penetapan Batas-batas Landas Kontinen Indonesia-Australia."

Selama sepuluh tahun sejak Timor Timur menjadi bagian negara kesatuan RI, berbagai upaya dan langkah penataan baik dalam segi pemerintahan maupun rehabilitasi sosial ekonomi telah dilakukan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Timor Timur tersebut, beberapa sektor yang dipandang menjadi kebutuhan mendasar mendapatkan prioritas utama. Penerbitan kali ini ditutup oleh tulisan J. KRISTIADI, berjudul "Sepuluh Tahun Pembangunan Timor Timur," mengemukakan penanganan pemerintah terhadap lima sektor yang diprioritaskan. Di dalamnya diajukan pula hambatan-hambatan yang dihadapi, penanggulangan masalah serta langkah-langkah bagi proyeksi masa depan.

November 1986

REDAKSI

158  
158

## Dekolonisasi Timor Timur

J. KRISTIADI\*

### LATAR BELAKANG POLITIK DEKOLONISASI

Kudeta 25 April 1974 di Portugal melahirkan dua program politik baru, yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang otoriter dan fasistis, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan "getirnya" perang kolonial di Afrika.

Gagasan dekolonisasi, baik yang tumbuh di kalangan perwira-perwira muda maupun yang tumbuh di pikiran Jenderal Spínola lahir karena latar belakang yang sama. Perang di Afrika (daerah jajahannya) menyebabkan negara itu tertinggal dan terbelakang di antara negara-negara Eropa. Dari gagasan dekolonisasi, kemudian terciptalah politik dekolonisasi. Tetapi karena sesudah kudeta muncul dua pool penentu strategi politik, maka politik dekolonisasinya pun mempunyai dua versi. Pertama, versi Spínola yang sifatnya konservatif dan kedua, versi Movimento, gerakan yang bersifat radikal dan konsekuen. Namun demikian keduanya mempunyai latar belakang dan motif yang sama, yaitu usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara Portugal sendiri, yang terlalu berat menanggung beban perang kolonialnya di Afrika sehingga negeri itu menjadi melarat dan terbelakang. Jadi, politik dekolonisasi Portugal itu bukan dilandasi oleh tuntutan zaman dan kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak bagi semua bangsa, yang mengharuskan semua penjajahan di muka bumi ini dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, melainkan karena kepentingan nasionalnya terancam.

Kudeta tersebut di atas tidak hanya membawa perubahan-perubahan radikal di dalam negeri Portugal saja, tetapi juga membuka lembaran baru

\*Staf CSIS

dalam sejarah politik di negeri-negeri jajahannya. Langkah-langkah dan janji-janji baru rezim baru pimpinan Jenderal De Spínola, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan gerakan kemerdekaan di negeri-negeri jajahannya, telah memberikan nafas baru dan peluang lebih besar bagi para pejuang kemerdekaan.

Di Timor Timur, janji-janji itu antara lain berupa: pengembalian hak-hak sipil termasuk hak-hak demokrasi; pembubaran partai pemerintah Aksi Nasional Rakyat (ANP); penghapusan polisi rahasia yang menjadi hantu bagi rakyat; peniadaan sensor pers; dan rakyat bebas untuk membentuk partai-partai politik dan mengambil bagian dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu rezim baru juga bermaksud untuk menerapkan asas-asas dekolonisasi bagi propinsi-propinsi seberang lautan dan mengadakan referendum untuk menentukan status politik dan hari depan negerinya masing-masing. Pemerintah akan secara konsekuen menerima hasilnya. Dengan landasan politik dekolonisasi itu, maka di Timor Timur kemudian berdiri tiga buah partai, yaitu Apodeti (Associaçao Popular Democratica Timorensis), UDT (Uniao Democratica Timorensis) dan Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente - Front Radikal Timor Merdeka).

## KEPARTAIAN DI TIMOR TIMUR

Pada masa penjajahan Portugal hanya ada satu partai pemerintah yaitu Partai Pemerintah Aksi Nasional Rakyat (ANP). Sesuai dengan politik dekolonisasi, maka Portugal memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai politik. Namun tampaknya kesempatan itu justru merugikan rakyat Timor Timur, karena rakyat Timor Timur yang tingkat pendidikannya sangat terbatas, dan masih selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang lebih mendasar yaitu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, belum merasakan perlu adanya suatu partai politik. Sebagai masyarakat yang masih kuat memegang tradisi, di mana raja merupakan pemimpin dan sekaligus panutan rakyat, maka pranata sosial politik, seperti partai politik hanya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan sempit, membentuk pengelompokan-pengelompokan yang dapat membahayakan semangat kebersamaan mereka dalam menentukan masa depannya. Dengan demikian aspirasi rakyat banyak justru tidak dapat disalurkan melalui institusi-institusi politik modern seperti itu. Dengan latar belakang yang demikian kiranya pemahaman mengenai kepartaian di Timor Timur dapat ditempatkan dalam proporsi yang lebih wajar.

Berdasarkan kronologi pembentukannya, partai politik di Timor Timur dapat disebutkan sebagai berikut:

## Partai UDT

Partai UDT dibentuk pada tanggal 12 Mei 1974, merupakan partai terbesar, dan didirikan oleh sekelompok tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari 23 orang. Dalam kaitannya dengan politik dekolonisasi di dalam Partai UDT ada tiga aliran. Pertama, aliran di bawah pengaruh Ir. Mario Viegas Carascalao yang menghendaki rakyat sendiri yang menentukan nasibnya. Aspirasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa dengan formulasi seperti itu Partai UDT akan menjangkau wilayah akseptasi masyarakat yang lebih luas. Pertimbangan lain adalah adanya keyakinan dari Ir. Mario Viegas Carascalao bahwa aspirasi murni rakyat Timor Timur adalah berintegrasi dengan Republik Indonesia. Kedua, kelompok yang dipimpin oleh Moutinho menghendaki status quo, yaitu agar Timor Timur tetap di bawah naungan Portugal. Dan ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Dominggus da Oliveira yang menghendaki Timor Timur sebagai federasi dengan Portugal. Di antara ketiga kelompok tersebut, tampaknya kelompok di bawah pimpinan Mario Viegas Carascalao adalah kelompok yang mempunyai pendukung paling kuat karena mempunyai aspirasi yang didasarkan atas kebebasan rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Aspirasi ini mempunyai wilayah penerimaan yang luas mengingat hal itu dianggap sebagai cara untuk dapat meningkatkan martabat rakyat Timor Timur. Meskipun aspirasi ini tidak secara eksplisit menghendaki integrasi dengan Republik Indonesia tetapi mendapat dukungan pula dari anggota masyarakat yang mempunyai cita-cita integrasi dengan Republik Indonesia.

Perkembangan Partai UDT selanjutnya menunjukkan bahwa dengan pertimbangan segera perlu menyelamatkan rakyat Timor Timur dari keganasan Fretilin maka para pimpinan Partai UDT memutuskan untuk menyatakan secara eksplisit kehendaknya untuk integrasi dengan Republik Indonesia. Dengan pernyataan tersebut berarti kekuatan yang melawan Fretilin lebih besar, dan diharapkan dalam waktu yang singkat perang saudara dapat segera diakhiri. Namun hal itu mengakibatkan perpecahan dalam Partai UDT, sebagian ada yang bergabung dengan Fretilin, ada pula yang menjadi warga negara Portugis. Tetapi sebagian besar mendukung UDT menerima keputusan tersebut.

## Partai Fretilin

Sebelumnya dikenal sebagai Associacao Social Democratica Timorese (ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 oleh beberapa orang, termasuk Jose Manuel Ramos Horta, yang kemudian menjabat Sekretaris Urusan Luar Negeri, sedangkan Ketuanya, Fransisco Xavier do Amaral. Perubahan nama partai tersebut terjadi setelah kedatangan lima orang mahasiswa dari Lisabon bulan Agustus 1974. Sejak itu nama Fretilin mulai dipakai. Di samping programnya lebih mantap, pola gerakannya lebih bergeser ke

Marxis. Fretilin menolak prinsip perjuangan UDT maupun Apodeti, dan tetap berpegang pada prinsipnya sendiri yakni kemerdekaan penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada suatu negara manapun. Walaupun Fretilin menilai Indonesia mempunyai kedudukan penting di Asia Tenggara, dan menganggap perlu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah Timor Timur (karena banyak pemakainya), Ramos Horta berpendapat bahwa kebudayaan, bahasa dan adat-istiadat Indonesia sangat berbeda dengan rakyat Timor Timur yang dinilainya lebih dekat dengan Portugis. Karena itu bahasa Portugis dijadikannya bahasa resmi, sedangkan bahasa Tetum yang diakui sebagai bahasa yang banyak dimengerti dan dipakai rakyat Timor dinilainya tidak lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai bahasa resmi.

### Partai Apodeti

Sebelumnya dikenal sebagai Partai Perhimpunan Integrasi Timor-Indonesia (AITI), yang didirikan 27 Mei 1975 oleh Fernando Osorio Soares, bekas pengungsi Portugis. Di dalam partai ini tergabung pula Arnaldo dos Reis Araujo. Partai ini selalu diasumsikan sebagai wadah kelompok yang mempunyai aspirasi untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Sebagian dari asumsi itu benar, karena memang di dalam Partai Apodeti tergabung AITI yang sejak semula mempunyai aspirasi tersebut. Namun perlu diketahui pula bahwa masih banyak anggota masyarakat yang mempunyai aspirasi semacam itu tetapi tidak tergabung dalam Partai Apodeti. Demikian pula sebaliknya, tidak seluruh anggota Apodeti mempunyai aspirasi untuk integrasi secara murni. Setidak-tidaknya di dalam Apodeti terdapat pula beberapa unsur yang semula mempunyai aspirasi lain, yaitu menggabungkan Timor Timur dengan Timor bagian barat dan memerintah sendiri. Namun hal itu kiranya dinamika yang wajar dalam proses kristalisasi, dan akhirnya kelompok tersebut mencapai kesepakatan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, AITI, adalah legalisasi dari gerakan-gerakan kemerdekaan di Timor Timur yang sudah lama ada. Banyak di antara tokoh-tokoh partai itu merupakan pejuang dalam pemberontakan rakyat tahun 1945-1949 di Los Palos. Oleh karena itu, seperti hanya perjuangan pada masa-masa tersebut, berdirinya Partai Apodeti berdasar pada aspirasi rakyat Timor Timur yang merasa bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia juga, yang terpengaruh karena perselisihan berabad-abad antara kolonialis Belanda dan Portugis, yang kemudian diakhiri dengan perjanjian tahun 1904 yang meresmikan pembelahan Pulau Timor menjadi dua bagian. Namun karena perselisihan terus berlangsung, pada tahun 1946 perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan arbitrase di Den Haag. Pengadilan ini memutuskan bahwa Belanda tetap menguasai Timor bagian barat, sedangkan Portugis, selain

mendapatkan Pulau Timor bagian timur, juga mendapatkan Pulau Atauro (utara Dili) dan daerah Oekusi di pantai utara Timor bagian barat.

Sentimen historis yang tumbuh luas di kalangan rakyat menimbulkan anggapan bahwa pemisahan Timor Timur dengan Indonesia adalah suatu persoalan kemanusiaan yang harus dilawan.

Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai aspirasi berintegrasi dengan Republik Indonesia telah menyusun kekuatan jauh sebelum kudeta Portugal untuk mewujudkan cita-citanya.

Sentimen historis yang tumbuh kuat di kalangan rakyat, yang menganggap dirinya bangsa Indonesia, menyebabkan hilangnya arti sebuah garis perbatasan. Hubungan dengan masyarakat Timor Indonesia berlangsung akrab, karena mereka sama-sama merasa bahwa semua suku Timor adalah bangsa Indonesia.

Prinsip perjuangan Partai Apodeti, selain tercermin dari nama lamanya, juga dari Manifesto Politiknya tanggal 27 Mei 1974 yang menyebutkan antara lain:

Mengingat bahwa untuk mengakhiri kebebasan yang diberikan itu maka Timor Timur akan memilih secara konkrit: (a) Integrasi ke dalam masyarakat Indonesia; (b) Kebebasan keadilan sosial; (c) Integrasi yang berdasarkan Hukum Internasional berstatus propinsi otonomi.

Sedangkan sampai seberapa jauh tekadnya memperjuangkan prinsip untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, terlihat dari Anggaran Dasarnya, khususnya dalam Bab II tentang Asas dan Tujuan; Pasal 2 (Asas) berbunyi:

Partai Apodeti berasaskan:

- Ke Tuhanan Yang Maha Esa;
- Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- Kesatuan kultur, geneologis, persamaan sejarah dan persamaan nasib;
- Permusyawaratan perwakilan; dan
- Keadilan Sosial.

Sedangkan Pasal 3 (Tujuan) berbunyi:

Partai Apodeti bertujuan mewujudkan *cita-cita Kemerdekaan bagi rakyat Timor Portugis serta berintegrasi dengan Indonesia*, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Timor Portugis.

Sementara itu, sikap Apodeti terhadap tiga alternatif bagi masa depan Timor Timur adalah sebagai berikut: *Pertama*, alternatif yang diemban sebagai prinsip perjuangan Partai UDT, yaitu untuk menjadikan Timor Timur sebagai negeri berotonomi luas dalam suatu federasi Portugal atau merdeka tetapi berada dalam lingkungan kesemakmuran Portugal. Apodeti dengan tegas menolak cita-cita seperti itu karena selain tidak sesuai dengan prinsip

rakyat Timor Timur, juga tidak akan dapat mencapai tujuan utama ke arah masyarakat adil dan makmur. Cita-cita yang dipandang masih menggantungkan diri pada Portugal itu tidak realistis karena Portugal dinilai sudah bangkrut sehingga tidak akan mampu memberikan payung pengayom bagi Timor Timur.

*Kedua*, alternatif yang menjadi tujuan Fretilin, yaitu merdeka penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada negeri manapun. Apodeti juga menolak karena kondisi dan situasi Timor Portugis tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka berdaulat dan bebas. Cita-cita ini dianggap sebagai ilusi yang kalau terlaksana akan membuat Timor Timur menjadi ajang percaturan kekuatan-kekuatan besar yang dapat lebih menyengsarakan rakyat. Selain itu, juga tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Timor Timur yang mendambakan bersatu dengan Indonesia. Sebab secara geografis Timor Timur adalah bagian dari Pulau Timor, salah satu dari kepulauan Nusantara yang sejak dahulu sudah merupakan kesatuan geopolitik. Rakyat Timor juga merupakan satu suku bangsa dengan satu bahasa daerah yaitu bahasa Tetum. Itulah sebabnya hubungan famili masih terus berlangsung walaupun hukum kolonial memisahkannya.

*Ketiga*, adalah alternatif yang menjadi tujuan Apodeti yaitu pengintegrasian Timor Timur ke dalam Republik Indonesia, yang oleh Apodeti disebut sebagai "Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi." Semula, kedua partai lainnya menolak alternatif ini, tetapi UDT kemudian dapat menerimanya. Di lain pihak Fretilin tetap menolak alternatif ketiga ini. Dengan demikian hanya ada dua alternatif bagi masa depan Timor Timur.

## KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH INDONESIA

Politik dekolonisasi Portugal yang membuka peluang bagi perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah jajahan Portugal, telah menumbuhkan pergolakan dan perang saudara yang berlarut-larut di Timor Timur. Hal yang demikian telah menarik perhatian Pemerintah Indonesia yang mempunyai kepentingan agar wilayah tersebut tidak menjadi daerah yang rawan.

Menghadapi perkembangan yang terjadi di Timor Timur, Indonesia sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan struktural, serta GBHN sebagai pedoman penentu sikap dan arah tindakan, melalui Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, Presiden Soeharto dengan resmi menyatakan "Sikap Dasar" Indonesia terhadap masalah Timor Timur sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai ambisi teritorial:

- b. Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri;
- c. Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan akan menjadi sebagian wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Politik dekolonisasi sendiri adalah politik yang terpuji dan sejiwa dengan semangat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Karena itu Indonesia bisa menerima prinsip politik dekolonisasi Portugal itu. Tetapi, Indonesia akan menentang jika politik dekolonisasi itu hanya merupakan manifestasi dari bentuk kolonialisme lama menjadi kolonialisme model baru. Selain dari pada itu bagi Indonesia proses dekolonisasi itu tidak boleh mengganggu stabilitas kawasan sekitarnya. Maka hasil dekolonisasi juga tidak boleh membuat Timor Timur menjadi wilayah rawan, sebagai ajang persaingan negara-negara besar yang dapat mempersulit posisi Indonesia.

Sementara itu aspirasi dan sentimen satu nation, satu tanah air dan satu cita-cita dengan rakyat Indonesia tetap berkembang di kalangan rakyat Timor Timur, usaha menyatukan kembali Timor Timur sebenarnya merupakan suatu usaha menyatukan kembali bagian yang terpisah yang pada hakikatnya adalah satu. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan ialah mengadakan pendekatan-pendekatan baik terhadap pemerintah jajahan maupun terhadap rakyat Timor Timur. Dalam hal ini Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (saat itu), El Tari, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Timor Timur yang dikuasai Portugis itu, memegang peranan penting. Kebijaksanaan ini lebih mengenai sasarannya karena perekonomian Portugal yang menjadi penyangga utama perekonomian Timor Timur makin payah keadaannya. Sedangkan pajak dari rakyat hanya sebagai pelengkap yang kurang berarti. Dan produksi pangan tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan Timor Timur sendiri.

Keadaan seperti itu menyadarkan pemerintahan jajahan akan perlunya bantuan ekonomi dari Indonesia dan membuka isolasi politik dan ekonomi yang semula sangat ketat. Bahkan melalui suratnya tertanggal 4 Mei 1974 yang ditujukan kepada Gubernur NTT El Tari, Gubernur pemerintahan jajahan Timor Timur, Fernando Alves Aldeia, mengajukan permintaan suplai minyak bumi maupun tepung terigu yang merupakan bahan pokok makanan penduduk. Selain itu, dalam perundingan dengan Gubernur NTT El Tari, pemerintahan jajahan Timor Timur itu, juga meminta suplai ternak secara teratur dari NTT. Dan dalam rangka kerjasama, direncanakan juga membuka pasar bersama di daerah perbatasan, di samping kerjasama di bidang



meteorologi, komunikasi radio, hubungan laut reguler, hubungan darat dengan bus, dan lain-lain. Singkatnya, kunjungan Gubernur NTT ke Dili tanggal 28 Februari - 2 Maret 1974, telah berhasil membuka isolasi yang sebelumnya tertutup rapat-rapat oleh pihak Pemerintah Portugal.

Hubungan baik ini tercermin juga setelah terjadinya kudeta 25 April 1974 di Portugal. Pada tanggal 17 Mei 1974, Gubernur Timor Timur telah mengutus Kepala Staf Angkatan Darat Portugis di Timor Timur, Mayor Arnao Matello, untuk menemui dan memberikan keterangan kepada Gubernur NTT di Kupang tentang terjadinya perubahan-perubahan politik di Portugal. Dijelaskan juga, bahwa sebagai konsekuensi perubahan ini rakyat Timor Timur akan diberikan kesempatan untuk secara demokratis menentukan nasibnya sendiri. Pihak tentara di Timor Timur akan menjamin dilangsungkannya pemilihan itu. Untuk itu dinyatakan sudah berdirinya Parpol UDT dan ASDT, walaupun program yang konkrit belum ada.

Di samping kedua partai itu, yang masing-masing menginginkan plebisit untuk menentukan nasib sendiri, dan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, muncul partai ketiga yaitu partai AITI (Associacao Integracao de Timor-Indonesia) yang menghendaki integrasi dengan Indonesia. Ketiganya merupakan wadah pembawa aspirasi rakyat untuk mengikuti referendum yang direncanakan berlangsung bulan Maret 1975.

Pada mulanya sepak terjang ketiga partai itu, untuk memenangkan referendum, cukup sportif dan masing-masing bergerak menurut aturan permainan yang telah ditentukan. Sedangkan pihak pemerintah menunjukkan kemampuannya sebagai stabilisator. Bahkan hubungan baik dengan Indonesia tetap dijaga. Akan tetapi, setelah Gubernur Fernando Alves Aldeia diganti oleh Gubernur baru, Letkol Lemos Pires (seorang perwira anggota Movimento) tanggal 8 November 1974, terjadi perubahan-perubahan besar dalam situasi politik di Timor Timur. Campur tangan penguasa terhadap parpol menyebabkan timbulnya ketidakpuasan di kalangan parpol yang merasa dianaktirikan. Persaingan antara parpol makin tajam, dan sportivitas mulai ditinggalkan.

Keadaan semakin tidak menentu setelah penguasa mengajukan rencana baru untuk membentuk "Dewan Konstituante" yang beranggotakan 10 orang, masing-masing satu orang dari partai, sedang tujuh lainnya praktis dimonopoli oleh penguasa. Melalui dewan itu Partai Komunis Portugal (PCP) berusaha mendominasi dan mendalangi pergolakan politik di Timor Timur, seperti yang mereka lakukan di Portugal melalui Movimento das Foreas Ar-nadas (MFA).

Rencana yang jelas menyimpang dari proses dekolonisasi sebagaimana

digariskan oleh Pemerintah Lisabon ditentang oleh ketiga partai politik dengan alasan masing-masing. Apodeti menentang dengan alasan bahwa dewan konstituante tidak akan ada gunanya, dan Apodeti menghendaki referendum. Fretilin menentang karena di dalam dewan tersebut akan ada wakil dari Apodeti. Sementara itu UDT menerima dewan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa adanya wakil-wakil dari partai politik dalam dewan tersebut tidak akan mudah dimanipulasi oleh Pemerintah Portugis dalam hal ini MFA. Sedangkan rencana referendum, walaupun kemudian pelaksanaannya diundur sekitar bulan Juni 1975, namun hal ini tidak pernah menjadi kenyataan. Ini berarti proses dekolonisasi Timor Timur menjadi tidak menentu.

Data-data menunjukkan bahwa rusaknya proses dekolonisasi tersebut disebabkan adanya unsur-unsur PCP yang dengan sengaja menyusup ke Timor Timur dengan membonceng pergantian gubernur. Karena mereka mempunyai kepentingan strategis, yaitu dekolonisasi harus menghasilkan posisi Timor Timur yang menguntungkan strategi gerakan-gerakan golongan kiri. Karenanya mereka berusaha untuk dapat secara langsung mengarahkan proses dekolonisasi Timor Timur, walaupun prosesnya bertentangan dan menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Lisabon.

Sebab, ternyata dari hasil pendekatan dan penjajagan delegasi Indonesia pimpinan Letjen Ali Moertopo pertengahan bulan Oktober 1974, jelas bahwa dalam proses dekolonisasi di Timor Timur Pemerintah Lisabon berpegang pada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menyerahkan masa depan Timor Timur sepenuhnya pada aspirasi rakyat Timor Timur.
2. Merdeka dan berdiri sendiri bagi Timor Timur adalah suatu hal yang tidak realistis.
3. Berdiri sebagai negara bagian dalam federasi Portugal adalah mengingkari hakikat politik dekolonisasi Portugal.
4. Integrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedudukan masa depan Timor Timur yang paling realistis.
5. Menghargai, mengakui dan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk turut menggarap masa depan Timor Timur.
6. Menyadari sepenuhnya kepentingan dan kedudukan Indonesia dalam masalah Timor Timur.

Karena sikap Pemerintah Portugal ini tidak akan menguntungkan strategi gerakan golongan kiri maka PCP memaksa kehadirannya di Timor Timur. Itulah sebabnya terjadi situasi seperti tersebut di muka. Selain berusaha menyingkirkan peranan Indonesia, mereka juga berusaha menyatukan Fretilin dan UDT untuk menghadapi Apodeti. Tetapi UDT kemudian sadar bahwa

mereka hanya diperalat oleh para penguasa Timor Timur yang marxistis. Mereka juga merasa bahwa Fretilin yang dianakemaskan telah bergeser ke kiri dan nyata-nyata berhaluan marxistis. Karena itu koalisi UDT dengan Fretilin tidak mungkin dipertahankan lagi. Kesadaran UDT ini dijelaskan oleh ketua dan wakil ketuanya pada saat berkunjung ke Jakarta tanggal 14 April 1975, dalam rangka meminta bantuan kepada Indonesia.

### PENDEKATAN KEPADA PEMERINTAH PORTUGAL

Sebagai pemerintah yang mempunyai prakarsa dekolonisasi, kedudukan Portugal sangat menentukan proses dekolonisasi wilayah jajahannya. Oleh karenanya perlu pendekatan dan penjajagan kepada Pemerintah Portugal di Lisabon. Untuk itu, melalui Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, Presiden Soeharto menugaskan Letjen Ali Moertopo, untuk melaksanakan misi penting tersebut guna menerangkan kepada Pemerintah Portugal mengenai sikap Indonesia terhadap masalah Timor Timur. Selain itu, Letjen Ali Moertopo juga bertugas untuk meyakinkan Portugal bahwa mengingat posisi Indonesia maka adalah wajar kalau Pemerintah Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap masa depan Timor Timur. Dalam memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada Timor Timur, Pemerintah Portugal perlu bertindak sedemikian rupa, hingga langkahnya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas di kawasan itu, yang akhirnya akan merupakan beban bagi Pemerintah Portugal sendiri.

Oleh karena pada waktu itu hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan Portugal telah terputus, maka sebelum melakukan pendekatan langsung ke Lisabon, Jenderal Ali Moertopo menugaskan dua orang penghubung untuk berusaha merintis jalan ke Lisabon termasuk untuk mempertemukan Jenderal Ali Moertopo dengan pejabat-pejabat teras Pemerintah Portugal.

Sementara itu, dua minggu sebelum dilakukannya tugas pendekatan itu, tepatnya tanggal 30 September 1974, Presiden Spínola telah mengundurkan diri dan diganti oleh Jenderal Da Costa Gomez. Hal ini berarti terjadi perubahan-perubahan konstelasi politik di Portugal, yaitu tersisihnya golongan moderat dan makin menonjolnya peranan golongan radikal. Dengan kata lain adalah makin besarnya peranan Movimento dengan tokoh utamanya PM Vasco Goncalves dalam pemerintahan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah acara kunjungan misi Jenderal Ali Moertopo, mengingat beberapa figur pejabat teras pemerintahan waktu itu diperkirakan masih akan tetap mempunyai posisi yang menentukan.

Ada lima tokoh penting di Portugal yang berhasil dijaagi oleh delegasi In-

onesia, yang diketuai oleh Letjen Ali Moertopo. Berturut-turut tokoh tersebut adalah Prof. Campignos, Wakil Menteri Luar Negeri; Menteri Luar Negeri Mario Soares; Presiden Da Costa Gomez; Perdana Menteri Vasco Goncalves; dan Menteri Urusan Dekolonisasi. Pada dasarnya penjelasan Letjen Ali Moertopo kepada kelima pejabat teras Pemerintah Portugal tersebut adalah sama. Yaitu posisi Indonesia dalam politik dekolonisasi Portugal atas Timor Timur, sikap dasar Indonesia, dan akhirnya pandangan Pemerintah Indonesia terhadap masa depan Timor Timur. Letjen Ali Moertopo menjelaskan bahwa Indonesia melihat adanya tiga alternatif bagi masa depan Timor Timur sebagai hasil dekolonisasi, yakni *merdeka di bawah naungan Portugal; menggabungkan dengan Indonesia; atau merdeka penuh.*

Dari ketiga alternatif itu, menurut penilaian Indonesia, alternatif ketiga adalah kemungkinan yang "paling kecil" karena dua faktor utama yakni, pertama rakyat Timor Timur belum mempunyai tenaga terdidik untuk membentuk suatu pemerintahan yang capable; dan kedua, "national resources" yang dipunyai tidak memadai bagi jaminan berdirinya suatu negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Dua faktor ini akan membuka peluang masuknya suatu kekuatan luar dengan maksud-maksud tertentu, baik atas permintaan Timor Timur sendiri maupun tidak. Jika itu terjadi, maka berarti terjadi suatu ketidakstabilan di Timor Timur khususnya dan Asia-Pasifik umumnya. Prospek inilah yang paling dikhawatirkan oleh Indonesia.

Sedangkan bila proses dekolonisasi, melalui referendum itu menghasilkan kenyataan keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka di bawah pengayoman Portugal, maka Indonesia tidak berkeberatan dan akan menghargainya. Tetapi kalau melalui referendum akan menghasilkan keinginan untuk menggabungkan diri dengan Indonesia, hal itu juga merupakan hal yang wajar. Sebab sesuai dengan kenyataan historis dan etnis, serta cocok pula dengan policy yang dicanangkan oleh Portugal sendiri, bahkan merupakan suatu hal yang dapat membantu terciptanya kestabilan dan keamanan kawasan khususnya dan dunia internasional umumnya. Namun demikian penggabungan itu harus dilakukan atas kemauan rakyat Timor Timur sendiri serta tidak bertentangan dengan UUD Republik Indonesia, yaitu penggabungan sebagai suatu propinsi otonom yang berstatus khusus. Sama sekali tidak sebagai negara merdeka tersendiri hingga dapat dilakukan dengan cara merupakan negara bagian.

Dari pertemuan-pertemuan delegasi Indonesia dengan pejabat-pejabat Lisabon tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Portugal:

1. Memang benar-benar serius dalam rencana dekolonisasinya bagi Timor Timur, tetapi belum menemukan konsepsi yang mantan:

2. Bisa mengerti posisi dan sikap Indonesia, dalam proses dekolonisasi Timor Timur;
3. Melihat penggabungan Timor Timur kepada Indonesia sebagai masa depan yang paling baik bagi rakyat Timor Timur sendiri, dan bagi stabilitas kawasan sekitarnya;
4. Mengharapkan adanya kerjasama yang lebih baik antara Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Indonesia, juga antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah di Timor Timur;
5. Bahkan sangat mengharapkan terjalannya hubungan diplomatik secepat-cepatnya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Portugal;
6. Sangat menghargai Pemerintah Indonesia yang merupakan pemerintah asing yang pertama mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat Pemerintah Portugal yang baru.

Selanjutnya, atas permintaan Portugal, pada bulan Maret 1975, Indonesia mengirimkan delegasinya ke London, yang diketuai oleh Letjen Ali Moertopo dengan anggota-anggota Duta Besar RI untuk Prancis dan Inggris, masing-masing Letjen A. Tahir, dan Laksamana Soebono; dan Dr. J. Halim, untuk mengadakan pertemuan membicarakan masalah Timor Timur dengan pihak Portugal yang diketuai oleh Menteri Negara Vitor Alves.

Hasil Pertemuan London tanggal 9 Maret 1975 itu, secara singkat dapat disebutkan bahwa sampai sekian jauh Portugal tetap beranggapan integrasi kepada Indonesia sebagai jalan yang paling rasional dan memadai dalam rangka proses dekolonisasi Timor Timur. Selain itu tampak pula kerepotan Pemerintah Timor Timur dalam menghadapi Partai Apodeti, hingga merasa perlu mengharapkan bantuan Indonesia untuk mendorong Apodeti agar bisa menerima konsepsi pembentukan "Consultative Body," dan agar bersedia pula duduk di dalamnya.

Satu hal yang sangat penting yang dapat disimpulkan dari "Pertemuan London" tersebut ialah adanya pengakuan de facto, bahwa di pihak Indonesia mempunyai kepentingan dalam proses dekolonisasi Timor Timur, sehingga dalam setiap perkembangan prosesnya, Indonesia harus selalu diperimbangkan, diperhitungkan dan diikutsetakan. Ini berarti dalam perkembangan proses dekolonisasi itu terdapat lima faktor penentu yang berkaitan, yakni Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Timor Timurnya, Partai Fretilin, UDT, Apodeti, dan Indonesia.

Sebagai realisasi dari Pertemuan London itu, yaitu agar masing-masing

tim khusus ke Timor Timur (Dili).

Selama di Dili, tim tersebut berhasil mengadakan pertemuan dengan Gubernur Timor Timur, Kolonel Lemos Pires, maupun dengan pimpinan partai-partai Apodeti, UDT dan Fretilin. Hasil penjajagan itu dicatat adanya beberapa kenyataan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pemerintahan, Mayor De Mota, Chief Cabinet Urusan Politik (anggota PCP), memegang peranan penting dan sangat menentukan. Namun demikian, ia belum mempunyai konsepsi politik yang mantap, dan masih banyak terpengaruh oleh sekelilingnya. Selain itu ia juga tidak mempunyai pengaruh kuat di lingkungan Angkatan Bersenjata.
2. Partai Apodeti menunjukkan tekadnya yang sangat mantap dan makin kuat untuk berintegrasi kepada Indonesia, justru karena adanya tekanan-tekanan yang berat dari pihak penguasa dan partai-partai lainnya. Bahkan mereka menyatakan pula kesiapannya untuk berjuang dengan jalan kekerasan, jika jalan yang lebih baik tidak bisa ditempuh.
3. Fretilin adalah satu-satunya partai yang mempunyai kemampuan baik di bidang organisasi maupun taktik-taktik perjuangan, berkat pembinaan dari bekas aktivis mahasiswa beraliran kiri yang datang dari Portugal khusus untuk membinanya. Di antaranya yang saat itu masih berada di Timor Timur adalah Antonio Carvarino. Walaupun dalam pembicaraan dengan tim khusus, Fretilin selalu berusaha mengelak dan menutup-nutupi identitasnya, tetapi susunan dan sistem organisasinya serta taktik-taktik perjuangannya jelas menunjukkan bahwa Fretilin adalah komunis atau setidaknya-tidaknya dibina oleh komunis. Rasa kebenciannya terhadap Indonesia sangat menyolok. Mungkin karena sikap Pemerintah Indonesia yang melarang kehidupan komunis di Indonesia.
4. Sebaliknya Partai UDT mulai menampakkan pengertian dan penghargaannya terhadap sikap Indonesia yang sangat menginginkan tidak terganggunya keamanan nasional dan dapat terciptanya kestabilan kawasan. Selain itu dinyatakan penghargaan terhadap Indonesia mengenai sikapnya terhadap komunisme.
5. Masih besarnya keyakinan Fretilin dan UDT, bahwa dalam masa lima sampai depalan tahun, Portugal akan mampu membangun Timor Timur sesuai dengan konsepsi dekolonisasinya.

Sementara itu, ketika menghadiri Sidang PBB akhir 1974, Menlu Adam Malik telah sempat mengadakan pertemuan dengan Menlu Portugal Mario Soares, di New York tanggal 21 September 1974. Hasil pembicaraan itu antara lain: keduanya bersedia bekerjasama dalam masalah Timor Timur, terutama

mengenai usaha penentuan nasib sendiri. Untuk itu perlu saling berkonsultasi. Mereka juga mendesak agar hubungan diplomatik segera dipulihkan guna memudahkan kerjasama dan konsultasi.

Sebagai lanjutan dari pertemuan tersebut dan didorong oleh hasil pembicaraan Letjen Ali Moertopo dengan pejabat-pejabat teras di Lisbon, Pemerintah Portugal mengirim utusannya, Menteri Seberang Lautan, Dr. Antonio de Almeida Santos, ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia mengenai masalah dekolonisasi Timor Timur. Dalam pernyataan persnya ketika tiba di Jakarta tanggal 16 Oktober 1974, Dr. Santos mengemukakan kembali mengenai sikap Pemerintah Portugal terhadap masalah Timor Timur yang pada pokoknya sama, sebagaimana telah dikemukakan di bagian muka. Demikian juga sebaliknya, ketika ia bertemu dengan Presiden Soeharto maupun Menlu Adam Malik, pihak Indonesia tetap mengemukakan sikap Indonesia sebagaimana sebelumnya.

Menteri Almeida Santos yang melanjutkan perjalanannya ke Timor Timur, mengatakan di Dili tanggal 20 Oktober 1974 bahwa tidak akan segera diadakan referendum di Timor Timur. Rakyat Timor Timur lebih dahulu memilih wakil-wakilnya dalam Dewan Konstituante, dan dewan tersebut yang nantinya menentukan pemilihan umum. Dikatakannya juga bahwa kemerdekaan Timor Timur, pada waktu sekarang ini tidak realistis.

Selanjutnya, tanggal 27 Desember 1974, Menteri Almeida Santos mengirimkan memo kepada Sekjen PBB, Panitia 24, dan juga United Nation Emergency Operation, yang isi pokoknya:

1. Rakyat Timor Timur menghendaki tetap bergabung dengan Portugal.
2. Portugal setuju Timor Timur merdeka kalau memang dikehendaki oleh mayoritas penduduk.
3. PBB diminta memberikan bantuan sebesar US\$7,5 juta untuk mengatasi kelaparan di Timor Timur.
4. Indonesia dan Australia sangat sensitif kalau terjadi kegoncangan di Timor Timur.

Anehnya, dalam memo tersebut tidak disebutkan kemungkinan integrasi Timor Timur dengan Indonesia, yang sebelumnya telah disinggung juga dalam pembicaraan antara Indonesia dan Portugal, maupun dalam pernyataan sikap dasar masing-masing.

Dalam pada itu, atas dasar hasil-hasil misi Letjen Ali Moertopo ke Lisbon pertengahan Oktober 1974, dan hasil perundingan Menlu Adam Malik dengan Dr. Santos di Jakarta pada bulan yang sama, Indonesia mulai mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Portugal [hubungan ini terputus se-

jak 1964, ketika negara-negara non-aligned mengadakan aksi bersama mengisolir negara-negara kolonial (termasuk Portugal) yang tidak menunjukkan toleransi terhadap perjuangan kemerdekaan negara-negara terjajah]. Sebagai tindak lanjut, maka pada tanggal 10 Mei 1975, Pemerintah Indonesia memutuskan mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Portugal yang berkedudukan di Lisabon. Sayangnya, hubungan ini terputus kembali tanggal 7 Desember 1975, ketika Dili jatuh ke tangan pasukan gabungan, yang dinilai oleh Portugal sebagai akibat invasi militer Indonesia.

### PERGOLAKAN DI TIMOR TIMUR

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa setelah pergantian gubernur pada bulan November 1974, terjadi perubahan situasi politik di Timor Timur. Persaingan di antara ketiga partai semakin runcing, terutama dengan adanya campur tangan penguasa yang tampaknya hanya memihak pada partai tertentu Fretilin. Gubernur Lemos Pires, yang adalah perwira Movimento yang termasuk moderat dan orientasi politiknya pada golongan sosialis, kebijaksanaannya cenderung untuk menguntungkan UDT. Sementara sikap dan tindakan pembantu-pembantunya, yang sebagian adalah anggota Partai Komunis Portugal (PCP), cenderung untuk menguntungkan Fretilin. Sementara itu beberapa tokoh Apodeti mendapat dukungan penuh dari Mayor Arnao Matello, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Portugal di Timor Timur. Keadaan seperti ini menjadikan kedudukan Apodeti yang mempunyai aspirasi integrasi dengan RI bertambah sulit, apalagi berbagai kebijaksanaan dan tindakan penguasa lebih bersifat menekan kedudukan anggota-anggota Apodeti yang mempunyai aspirasi seperti itu.

Ketidakselarasan penguasa Timor Timur itu tercermin juga dari kebijaksanaan/konsepsi mereka mengenai dekolonisasi Timor Timur yang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Pemerintah Portugal di Lisabon. Keadaan yang mulai kacau ini bertambah meruncing lagi dengan berdirinya "Komisi Sersan Timor" pada tanggal 11 Januari 1975 (Sersan = tentara anak Timor). Komisi yang didominasi oleh sersan pendukung Fretilin ini merupakan hasil dari rencana baru sersan yang pro-Fretilin dan UDT, setelah sebelumnya gagal membentuk partai baru karena ditentang oleh sersan-sersan yang pro-Apodeti.

Bertolak dari berdirinya komisi tersebut, tanggal 20 Januari 1975 Fretilin dan UDT membentuk koalisi dan mengeluarkan komunike bersama yang ditandatangani Ketua Komite Sentral Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, dan Ketua Sentral UDT, Francisco Lopez da Cruz. Isi pokok komunike bersama tersebut adalah sebagai berikut:



1. Kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor bagian Timur atau Timor Dili.
2. Menolak Apodeti karena mempertahankan ide-ide integrasi dengan neo-kolonialis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Timur dan Piagam PBB.
3. Mengakui Portugal sebagai satu-satunya pelaksana yang sah dalam proses dekolonisasi, dan mengambil bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Timor Dili atau Timor Timur.
4. Minta bantuan PBB agar menyertai Portugal dalam proses dekolonisasi menuju kemerdekaan nasional bagi Timor bagian Timur atau Timor Dili.
5. Koalisi mempunyai hak untuk memilih negara-negara mana yang akan ambil bagian dalam komisi supervisi, dan menolak partisipasi negara-negara besar, negara ASEAN dan negara-negara lain yang berada dalam pengaruh Indonesia dan Australia.
6. Pembentukan suatu pemerintah peralihan melalui perundingan di Lisbon antara Pemerintah Portugal, Fretilin dan UDT.
7. Membentuk suatu komisi "ad hoc" dengan jumlah anggota yang sama dari kedua partai koalisi yang ditugaskan mempelajari program radio, ceramah-ceramah untuk disiarkan melalui organ-organ penerangan.
8. Non-ideological-agression dan saling menghormati program serta bentuk ideologi.
9. Timor Portugis diganti namanya dengan Timor Timur dan penduduknya disebut "Timores."

Dengan terbentuknya Komisi Sersan Timor dan Koalisi Fretilin-UDT, maka untuk sementara ofensif terhadap potensi Apodeti dan unsur-unsur pro integrasi dengan Indonesia, tampak lebih efektif. Tetapi karena terbentuknya komisi dan koalisi tersebut sebenarnya dipaksakan, dan bukan sebagai hakikat perjuangan, maka kedua badan tersebut dalam waktu relatif singkat sudah mengarah ke perpecahan.

Sementara itu, melalui radio Dili, UDT dan Fretilin melancarkan isu-isu yang dialamatkan kepada Indonesia, baik yang bernada negatif, mendiskreditkan Indonesia, maupun yang bernada bermusuhan. Hal ini dilakukan ternyata sebagai persiapan rencana perebutan kekuasaan di Timor Timur, berhubung dalam pertemuan di Lisbon akhir 1974 antara Indonesia dan Portugal yang dimantapkan lagi dalam Pertemuan London Maret 1975, hasil-hasilnya menunjukkan bahwa Portugal cenderung lebih memberi akomodasi pada aspirasi integrasi Timor Timur kepada Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mematahkan semangat perjuangan Apodeti, dan sekaligus menjajaki

sampai sejauh mana Indonesia bisa menahan diri dan memegang teguh sikapnya.

Perpecahan Fretilin dan UDT akhirnya tak bisa dihindari. Hal ini bisa diduga sebelumnya, karena secara politis dua partai itu berbeda secara fundamental. UDT menganut pola politik yang berbau konservatif-moderat dengan orientasi politik dekolonisasi konsepsi De Spinola. Sedangkan Fretilin menganut pola politik kekiri-kirian yang ekstrem, karena digarap oleh kader-kader MRPP (Movimento Revolucionario do Proletariado Portugues) dan juga dari PCP.

UDT akhirnya sadar bahwa koalisinya dengan Fretilin adalah suatu perangkat baginya. Apalagi Fretilin tampak bergerak makin ke kiri. Dan pada tanggal 27 Mei 1975 UDT mengeluarkan komunike resmi pemisahan dirinya dari Fretilin. Alasannya antara lain, bahwa Fretilin makin lama makin dikuasai oleh kaum komunis dan cara-cara perjuangannya membahayakan kepentingan rakyat Timor Timur. Selanjutnya, dalam rangka perjuangannya menentang komunisme, UDT mengadakan pendekatan dengan Apodeti dan bahkan minta bantuan pada Indonesia berupa pendidikan kader-kader guna membendung komunis dan bantuan biaya agar mereka bisa mengadakan kontak dengan negara-negara ASEAN, Taiwan dan Australia.

Sementara suhu politik di Timor Timur semakin meningkat, terutama karena hubungan antara Apodeti (yang ingin integrasi kepada Indonesia) dengan Fretilin (yang menolak integrasi) semakin bermusuhan, suatu pertemuan antara Pemerintah Portugal dengan Partai Apodeti dan UDT dilangsungkan di Macao tanggal 26-28 Juni 1975. Sebagaimana dijelaskan dalam Pertemuan London, maksud Pertemuan Macao ini untuk membentuk "Consultative Body" di mana duduk wakil ketiga partai. Tetapi karena Fretilin tidak mau hadir, dengan alasan tidak mau duduk semeja dengan Apodeti yang dinilai sebagai "boneka" karena ingin integrasi dengan Indonesia, maka bentuk pertemuan berubah menjadi sekedar hearing antara kedua partai yang hadir dengan Pemerintah Portugal. Dalam hubungan ini, sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Portugal dalam Pertemuan London, Indonesia juga mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Hongkong agar dapat memonitor jalannya pertemuan dan dapat diminta pendapatnya oleh delegasi Pemerintah Portugal.

Hasil positif dari Pertemuan Macao yang dapat dianggap sebagai hal yang membuat proses dekolonisasi Timor Timur menjadi lebih jelas, ialah telah ditentukannya jadwal referendum pada bulan Oktober 1976; sebagai penentuan status Portugal untuk meninggalkan Timor Timur yaitu Oktober 1978. Selain itu, untuk melaksanakan referendum ditetapkan akan dibentuk suatu "Governing Body," semacam badan pengelola wilayah Timor Timur.

Hasil yang dicapai dalam pertemuan itu, walaupun ada perubahan bentuk pertemuan, dinilai oleh para peserta sebagai hal yang cukup memuaskan ketiga belah pihak. Baik Apodeti maupun UDT menganggap bahwa aspirasi-aspirasi partainya dapat dengan berhasil dimasukkan dan ditampung dalam draft proyek dekolonisasi wilayah Timor Timur yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Portugal.

Berdasarkan hasil Pertemuan Macao itu, suatu naskah undang-undang yang telah memperoleh pengukuhan dari Dewan Revolusioner Militer Portugal, dan diumumkan pada tanggal 12 Juli 1975, menyatakan antara lain bahwa Timor Timur akan tetap menjadi daerah Portugal sampai bulan Oktober 1978. Menetapkan pembentukan sebuah "Majelis Rakyat" yang dipilih dalam pemilihan umum tahun 1976. Tugasnya adalah menentukan suatu politik dan administrasi daerah tersebut. Seorang Komisaris Tinggi Portugal akan mengatur dan memimpin pemerintahan yang akan dibentuk dengan lima orang anggota sebagai sekretaris eksekutif yang ditunjuk oleh Portugal. Tiga portofolio akan diberikan kepada tiga parpol di Timor Timur, yaitu Apodeti, UDT dan Fretilin. Posisi-posisi penting, Kehakiman dan Dalam Negeri, serta Keuangan dan Ekonomi akan dipegang oleh Portugal. Sedangkan posisi-posisi tidak penting seperti Kebudayaan dan Pendidikan, Perburuhan dan Sosial, serta Urusan Lingkungan dan Infrastruktur, diserahkan kepada ketiga partai.

Sementara itu, perpecahan koalisi UDT-Fretilin yang semakin meluas tidak berarti tekanan yang mereka lakukan terhadap Apodeti menjadi berkurang. Sebaliknya malahan semakin diperberat dan meningkat dengan cara menahan beberapa anggota Apodeti. Bahkan Raja Atsabe, seorang tokoh Apodeti yang sangat besar pengaruhnya di daerah Atsabe dan sekitarnya di mana semua rakyatnya menjadi anggota Apodeti, hampir ditangkap oleh Fretilin. Tetapi dapat diselamatkan oleh kelompok UDT yang dikirim dari Maliana oleh Joao Tavares, Wakil UDT Maliana.

Tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan suatu gerakan semacam perebutan kekuasaan yang dinamakannya sebagai "Movimento Revolusioner 11 Agustus." Semua pos-pos penting dalam kota Dili berhasil diduduki dan dikuasai. Ofensif ini dilakukan oleh UDT secara serentak dengan bantuan dari beberapa tokoh pemerintah yang pro-UDT. Sejalan dengan itu, Partai UDT menuntut kepada Pemerintah Timor Timur antara lain, agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan semua orang komunis dan lain-lainnya yang mempunyai sikap semacam itu dari Timor Timur; mempertahankan Lemos Pires sebagai Gubernur Timor Timur; melaksanakan dekolonisasi secara murni sesuai dengan Lei Constitucional No. 7/1979 yang rancangannya disetujui di Macao oleh UDT dan Apodeti.

Dan pada tanggal 13 Agustus 1975, UDT mengeluarkan komunike untuk menjelaskan maksud gerakannya kepada khalayak umum, yang menyatakan antara lain: bahwa gerakan 11 Agustus 1975 adalah suatu cetusan hati nurani rakyat Timor Timur yang sekian lama merindukan kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat. Untuk itu semua rakyat Timor Timur agar maklum bahwa UDT-lah yang ingin memegang tampuk pimpinan pemerintahan; dan menyerukan perlunya persatuan untuk melawan kaum reaksioner. Sedangkan kepada Angkatan Bersenjata, UDT menyerukan agar bersatu dengan UDT.

Sampai seminggu pertama, UDT rupanya masih cukup kuat menduduki posisi-posisi penting dan menguasai beberapa daerah secara mutlak. Baik Fretilin, Apodeti, pihak pemerintah maupun militer sama sekali tidak berlutik. Fretilin, di samping mulai mengadakan perlawanan, masih berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya. Beberapa orang dari oknum Apodeti bersama-sama dengan Fretilin melawan UDT di Dili dengan senjata.

Menghadapi situasi di Timor Timur yang semakin menggawat itu, pada tanggal 23 Agustus 1975 (yang kemudian diulangi lagi tanggal 25 Agustus) Portugal meminta Indonesia agar membantu pengungsian warga Portugal dan warga asing lainnya dengan mengirimkan kapal ke Timor Timur. Berdasarkan permintaan tersebut, Indonesia mengirimkan delegasi di bawah pimpinan Kolonel Soebiyakto dengan kapal KRI Mongonsidi merapat di Dili tanggal 27 Agustus 1975. Kolonel Soebiyakto mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh ketiga partai yang sedang bersengketa, dan suatu hasil luar biasa dicapai yakni ketiga partai itu menyetujui untuk mengadakan gencatan senjata selama empat hari guna memungkinkan pelaksanaan pengungsian. Setelah itu KRI Mongonsidi keluar dari perairan Dili dan mengambil posisi empat mil dari pantai.

Hasil perundingan tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Gubernur Lemos Pires untuk mengambil inisiatif gencatan senjata dan langsung menguasai seluruh keadaan. Namun hal itu tidak dilakukannya, bahkan mempersiapkan pengungsiannya ke Pulau Atauro. Dan suatu tindakan yang sangat keliru justru dilakukannya, yakni mengusir KRI Mongonsidi untuk meninggalkan Dili meskipun tindakan tersebut disayangkan oleh Pemerintah Australia yang menganggap bahwa yang dapat membuat perdamaian di Timor Timur adalah *Pemerintah Indonesia*.

Penguasaan UDT terhadap situasi Timor Timur ternyata tidak dapat berlangsung lama. Hanya seminggu sesudah Gerakan 11 Agustus 1975 itu keadaan mulai berbalik. Fretilin sudah mulai bergerak dan berusaha merebut kedudukan strategis di beberapa daerah. Hal itu karena pimpinan Fretilin bernama Rogenio Lobato diangkat oleh Lemos Pires sebagai Pang-

lima Angkatan Bersenjata di Timor Timur yang mempunyai senjata 27.000 pucuk. Dengan demikian Angkatan Bersenjata Portugal mendukung Fretilin. Selain itu Fretilin rupanya memanfaatkan kelemahan UDT yang hanya mengandalkan kekuatannya dengan "memegang" posisi para pejabat yang mempunyai kedudukan penting. Sedangkan penguasaan kekuatan militer sebagai salah satu faktor penting dan menentukan, kurang mendapat perhatiannya, walaupun sebagian militer berada di pihak UDT.

Boleh dikatakan bahwa gerakan ofensif UDT itu sebenarnya kurang didukung oleh suatu perencanaan yang matang, sehingga setelah berhasil, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Karena itu tidak mengherankan jika Fretilin dengan cepat bisa berofensif di semua daerah, bahkan berhasil merebutnya. Pengungsian Gubernur Lemos Pires dan dipindahkannya pemerintahan ke Atauro tanggal 27 Agustus 1975 merupakan pertanda akan habisnya harapan UDT untuk lebih unggul dari Fretilin, dan menandai pula mulai lenyapnya kekuasaan de facto Pemerintah Portugal di Timor Timur. Hal itu berarti pula Portugal cuci tangan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai penguasa Timor Timur. Dengan demikian Portugal tidak mempunyai kewenangan moral untuk mempertahankan Timor Timur lagi.

Sejak tanggal 26 Agustus 1975, secara berangsur-angsur Fretilin menguasai sebagian kota Dili, termasuk pelabuhan udara. Di Dili dan sekitarnya pasukan Apodeti tampak bekerjasama dengan Fretilin untuk melawan UDT yang merupakan counter coup yang telah dimulai sejak tanggal 20 Agustus 1975. Kemudian pendukung-pendukung Apodeti ditangkap oleh Fretilin. Menjelang bulan September 1975, kepercayaan rakyat dan parpol-parpol terhadap kekuasaan Portugis atas Timor Timur dapat dikatakan telah hilang sama sekali. Sementara itu tokoh-tokoh Apodeti dan Movimento 11 Agustus berusaha mendekati pos Indonesia untuk meminta bantuan senjata dari Indonesia guna menghadapi Fretilin yang gerakannya sudah makin meluas.

Ofensif Fretilin yang dimulai sejak akhir bulan Agustus itu, dalam waktu sebulan saja ternyata sudah bisa menguasai hampir seluruh wilayah Timor Timur, walaupun beberapa daerah basis UDT masih juga sanggup bertahan. Pada akhir September 1975 praktis seluruh wilayah Timor Timur sudah berada di bawah kekuasaan Fretilin. Namun di balik keberhasilannya itu, tanpa mengindahkan tata-krama hubungan internasional, Fretilin yang sudah merasa kuat itu sering melakukan pelanggaran wilayah dengan melakukan penembakan-penembakan ke wilayah Republik Indonesia, perampokan ternak dan bahan pangan di daerah RI. Bahkan pasukan patroli perbatasan RI beberapa kali mengalami kontak senjata dengan pasukan Fretilin di daerah Indonesia. Sementara rakyat diteror dan mengungsi ke wilayah RI. ICRC menaksir jumlah pengungsi tersebut sekitar 45.000 orang.

Dalam pada itu, sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara yang akan mereka namakan "Negara Demokrasi Timor Timur," pada tanggal 7 Oktober 1975 dilangsungkan rapat gabungan antara Komite Sentral Fretilin dengan Falintil (Angkatan Perang Fretilin). Hasil rapat ini adalah tersusunnya struktur organisasi ketatanegaraan termasuk susunan aparat pemerintahan eksekutif. Namun agar tidak menyolok dan mengundang reaksi dari luar yang dapat melemahkan perjuangan diplomatiknya, Fretilin menyatakan bahwa bentuk organisasi itu sebagai susunan organisasi Partai Fretilin.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1975, pimpinan Fretilin, Xavier Do Amaral, meresmikan Administrator Pemerintahan Sementara Timor Timur dan Komisi Urusan Ekonomi. Sedangkan mengenai penguasaan wilayah, pada akhir September 1975, juga telah diumumkan struktur pembagian wilayah pertahanan bagi seluruh Timor Timur termasuk personalia dan pembagian tugasnya.

Sementara itu, Apodeti yang secara militer mempunyai kedudukan paling lemah, dan tidak pernah mendambakan kemenangannya melalui kekuatan senjata, sebenarnya mempunyai kedudukan paling tangguh untuk menghadapi pertarungan "rebut pengaruh" yang sangat penting guna memenangkan referendum. Sebab, sumber kekuatan Apodeti adalah motivasi perjuangannya yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan ethnologis, geografis dan sentimen historis justru mudah dimengerti dan dihayati oleh rakyat. Dan karena yakin akan menang dalam referendum, Apodeti mengarahkan gerakannya pada pemupukan pengertian dengan rakyat. Sedangkan penyusunan kekuatan fisik bersenjata sama sekali diabaikan. Sebaliknya UDT dan Fretilin, karena menyadari beratnya perjuangan untuk memenangkan referendum, lebih mengarahkan gerakan-gerakannya pada penyusunan kekuatan fisik.

Bagi Apodeti, terjadinya gerakan-gerakan militer mengejutkan dan juga merupakan pukulan berat baginya. Mau tidak mau ia harus ikut bermain di dalamnya. Dan hanya karena kelihaiannya memanfaatkan situasi, Apodeti bisa berperan dalam pergolakan di Timor Timur. Di Dili, misalnya, Apodeti bersikap netral, sedangkan di sekitar Dili, mereka bekerjasama dengan Fretilin mengepung UDT yang menguasai Dili. Sebaliknya di beberapa daerah, Apodeti justru bekerjasama dengan UDT menghadapi Fretilin. Dengan cara ini, Apodeti bisa mengumpulkan senjata, dan malahan bisa memecah-belah lawan-lawannya, serta berhasil menarik kelompok moderat dari kedua partai itu untuk berpihak pada Apodeti. Namun semua itu bukannya tanpa pengorbanan. Apalagi pemanfaatan situasi itu tidak disertai dengan tindak lanjut. Sehingga ketika Fretilin berhasil menguasai Dili, hampir semua pimpinannya disekap Fretilin, kecuali Raia Atsabe, Maria Guilherme Gon-

calves dan putranya beserta anak buahnya yang berhasil melarikan diri ke perbatasan.

Sementara itu, pada tanggal 1 September 1975, beberapa di antara pimpinan daerah UDT menyiapkan rencana naskah proklamasi untuk bergabung dengan Indonesia.

Karena desakan pimpinan daerah UDT itu, pada tanggal 1 September 1975 itu juga, Ketua UDT, Lopez da Cruz, menemui pejabat-pejabat Indonesia di pos perbatasan RI, di Motaain. Selain menerangkan tentang situasi umum di Timor Timur terutama gerakan Fretilin, Ketua UDT itu mengemukakan pula bahwa UDT telah menemukan dokumen Fretilin di Bukole yang mengungkapkan adanya kerjasama antara Fretilin dengan eks-PKI. Bahkan untuk mengoperasikan senjata berat, Fretilin dibantu oleh beberapa orang unsur luar. Lopez juga menerangkan keinginan sebagian pimpinan daerah UDT untuk segera memproklamasikan penggabungan dengan Indonesia. Namun hal itu perlu dikonsultasikan dahulu dengan daerah-daerah lain. Untuk itu ia minta bantuan pesawat kecil dan pilot dari Indonesia agar dapat menghubungi daerah-daerah tersebut. Selain itu ia juga minta bantuan obat-obatan, dokter, pangan dan senjata-senjata berat, mortir dan mitraliur dari Indonesia.

Tanggal 2 September 1975, Ketua UDT, Lopez da Cruz, untuk kedua kalinya datang ke Motaain menemui pejabat Indonesia dengan maksud yang hampir serupa, terutama mengenai keinginan rakyat agar segera memproklamasikan penggabungan dengan Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih mengukuhkan usaha-usaha penggabungan itu, pada akhir September 1975, Lopez da Cruz mengeluarkan statement politik yang ditujukan kepada Kedutaan Besar RI di Canberra, Tokyo, Bangkok, Konsul Jenderal RI di Hongkong, Perwakilan KADIN RI di Taiwan, Menteri Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri Malaysia, dan Direktorat Urusan Eropa Departemen Luar Negeri Taiwan. Isi pokoknya adalah masalah penggabungan yang dilakukannya dengan Indonesia. Dinyatakan bahwa ketertiban dan keamanan Timor Timur telah dirusak oleh kegiatan peperangan yang dilakukan oleh Fretilin. Kekejaman dan pembunuhan massal terhadap penduduk banyak dilakukan oleh Fretilin hingga sangat menyengsarakan rakyat. UDT telah mengajukan pernyataan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini berarti bahwa mulai saat itu UDT bukan hanya bersahabat atau bersaudara dengan rakyat Indonesia, tetapi malahan sebagai satu keluarga atau satu masyarakat yang sama-sama berada di bawah naungan satu bendera Sang Merah Putih. Untuk itu, UDT merasa perlu dan ingin meneruskan serta memupuk hubungan tersebut agar lebih mendalam lagi.

Sementara itu Ketua UDT Lopez da Cruz dalam wawancara dengan TV

Jerman menyatakan bahwa tujuannya saat itu adalah menggabung dengan Indonesia. Dan karena UDT adalah Partai Demokrasi maka ia harus mengikuti suara dan keinginan rakyat terbanyak.

Tanggal 24 September 1975, sekembalinya misi khusus Dr. Santos yang mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di Jakarta tanggal 29 Agustus - 1 September dan 11-12 September 1975, Pemerintah Portugal mencoba mengajukan kebijaksanaan baru untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan mengundang tokoh-tokoh tiga partai yang bertentangan di Timor Timur untuk menghadiri pertemuan. Namun hal itu kurang mendapat tanggapan dari partai-partai UDT dan Apodeti karena menganggap saatnya kurang tepat, apalagi di lapangan mereka sedang "di bawah angin." Sehingga kalau diadakan perundingan mereka akan mudah dipaksakan menelan konsep pihak yang berada "di atas angin." Selain itu kurangnya tanggapan dari mereka terutama karena Portugal kenyataannya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menegakkan wibawanya di Timor Timur.

Sementara pergolakan terus berlangsung, timbul masalah lain yang cukup besar dan rumit penanganannya, yaitu masalah pengungsi. Sejak terjadinya gerakan 11 Agustus 1975 oleh UDT, arus pengungsian keluar Timor Timur semakin bertambah jumlahnya. Sebagian besar pengungsi itu memasuki wilayah Indonesia untuk mencari perlindungan bagi keselamatannya dari kekejaman perang saudara yang tidak terkendali, terutama dari ancaman kekejaman Fretilin yang bertindak semakin brutal. Peningkatan jumlah pengungsi ini sampai mencapai 45.000 orang. Untuk membantu para pengungsi itu, Indonesia harus menyediakan dana sebesar Rp 6 juta sehari.

Dalam pada itu, perkembangan pergolakan itu makin menunjukkan bahwa kekuatan bersenjata lebih bisa berbicara dalam perjuangan daripada kejujuran melaksanakan tata-krama perjuangan. Hal ini telah menggugah Apodeti untuk turut berbicara dengan kekuatan senjata di medan pertempuran. Konsolidasi anggota harus dipercepat dan usaha mendapatkan senjata harus diperhebat, guna meng-counter merajalelanya kekuasaan Fretilin. Untuk itu, beberapa tokoh Apodeti mengajak UDT guna melanjutkan perjuangan dengan berpihak pada Apodeti yang mengemban aspirasi rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia.

Pendekatan tersebut rupanya berhasil, hingga sejak awal September 1975 banyak pimpinan regional UDT yang berusaha memasuki wilayah Indonesia untuk menyatakan harapannya agar bisa bergabung dengan Indonesia. Bahkan panglima pasukan UDT, Joao Carrascalao (yang kemudian mengungsi ke Portugal), menyerukan agar Indonesia segera melancarkan ofensif militernya untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Namun, seperti sudah



diuraikan di muka, permintaan ini tidak bisa diterima karena Indonesia harus berpegang pada sikap dasar. Karena itu untuk mencapai tujuannya, mereka harus meneruskan perjuangannya dan harus bersatu dengan Apodeti dan unsur-unsur lainnya seperti Partai Kota dan Trabalista.

Mengenai Partai Kota, nama sebelumnya adalah Partai APMT (Associação Popular Monárquica Timorense) yang telah dibentuk tanggal 8 November 1974 tetapi belum mendapat pengakuan Pemerintah Timor Timur karena tidak dapat membuktikan jumlah pengikutnya. Selama itu APMT tidak dapat berkembang, tetapi setelah beralih menjadi Partai Kota (Klibur Oan Timor Aswain -- yang artinya Perhimpunan Masyarakat Pahlawan Timor) dan masuknya tokoh baru sebagai penggeraknya yaitu Jose Martins (yang kemudian berubah pikiran beralih ke Fretilin karena tidak puas dengan kedudukannya dalam PSTT), partai tersebut tampak lebih produktif dan berhasil menempatkan diri sebagai salah satu unsur yang cukup penting dalam konstelasi kekuatan anti-Fretilin.

Titik-tolak pendirian Partai Kota yaitu mencari dukungan kekuatan pada unsur-unsur pribumi dan berusaha memelihara identitas suku Timor. Menurut pimpinan Partai Kota, Jose Martins, Kota merupakan kawan perjuangan Apodeti untuk meng-counter Fretilin. Sedangkan Trabalista, sebelumnya hanya merupakan suatu gerakan buruh, yang berkembang menjadi sebuah partai.

Bertolak dari satu tekad itulah kemudian terbentuk suatu "pasukan gabungan" yang terdiri dari unsur-unsur partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista. Ofensif mereka inilah yang kemudian memporakporandakan pasukan Fretilin. Untuk memperkuat pasukan gabungan ini, pemuda pengungsi yang berada di wilayah Indonesia mulai dimobilisasi. Mereka ditangani langsung oleh para panglima masing-masing partai.

Guna mendapatkan suatu wilayah basis ofensifnya, pada tanggal 6 Oktober 1975 pasukan gabungan itu merebut Batugede, yang digunakan sebagai tempat pemusatan pasukan Fretilin. Bersamaan dengan jatuhnya Batugede, di beberapa daerah lain, pasukan gabungan, yang sebelumnya sudah diselundupkan, mulai melakukan ofensif yang mengejutkan Fretilin. Tanggal 16 Oktober 1975, pasukan gabungan berhasil menguasai Balibo. Selanjutnya, satu per satu daerah yang diduduki Fretilin, mereka kuasai lagi, termasuk bekas basis Apodeti dan UDT.

Di lain pihak, Fretilin mulai kehilangan garis perjuangannya, terutama ketika Dili berada dalam kepungan lawan. Meskipun demikian, di Dili pada tanggal 28 November 1975, Komite Sentral Fretilin masih bisa memaksakan

diri untuk memproklamasikan berdirinya negara yang mereka namakan "Republik Demokrasi Timor Timur," dan mengangkat serta menetapkan Xavier do Amaral sebagai Presiden.

Reaksi Pemerintah Indonesia atas proklamasi sepihak Fretilin itu tercermin dari pernyataan yang dibacakan oleh Menteri Penerangan Mashuri, SH, tanggal 29 November 1975 yang menyatakan antara lain:

1. Menyesalkan tindakan sepihak Fretilin yang bertentangan dengan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ke arah tercapainya penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor Portugis melalui perundingan sebagaimana telah disepakati oleh ketiga partai Timor Portugis, Pemerintah Portugal, dan juga Pemerintah Indonesia.
2. Menyesalkan pernyataan sikap Pemerintah Portugal seperti disampaikan oleh Menteri Kerjasama Portugal, Victor Crespo, kepada Dubes RI di Lisbon, pada tanggal 28 November 1975, yang maksudnya membenarkan tindakan Fretilin itu.
3. Indonesia tetap yakin bahwa masa depan Timor Portugis mesti ditetapkan oleh seluruh rakyat Timor Portugis sendiri. Dan Indonesia tetap tidak bisa mentolerir situasi di Timor Portugis yang dapat membahayakan stabilitas di kawasan ini.

Dalam hubungan itu, sikap Pemerintah Australia terhadap pernyataan sepihak Fretilin itu, tercermin dari pernyataan Menlu Andrew Peacock pada tanggal 29 November 1975, yakni antara lain bahwa Pemerintah Australia tidak mengakui pernyataan kemerdekaan sepihak Fretilin dan tetap mendukung penyelesaian secara damai. Australia bersedia dijadikan tempat untuk perundingan seperti itu.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, Australia memang mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah Timor. Sejak munculnya masalah Timor Timur Australia telah mengambil sikap yang berpegang pada prinsip penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur, dan menyambut baik setiap keputusan yang diambil oleh rakyat Timor Timur. Meskipun demikian, ia juga melihat kepentingan stabilitas regional yang menjadi salah satu prinsip pula bagi Indonesia. Oleh karena itu, segala tindak tanduk Indonesia dalam menghadapi masalah Timor Timur selalu mendapat perhatian dan sorotan Pemerintah Australia.

Akan tetapi, sebagai negara yang menganut demokrasi liberal, sulit bagi Pemerintah Australia untuk membatasi adanya gerakan-gerakan semacam CIET (Campaign for Independent of East Timor -- yang didirikan pada awal November 1974 oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi AICD,

- Australian Congress for International Cooperation and Disarmament -- yang sejak berdirinya Pemerintah Orde Baru telah sering melakukan usaha-usaha perongrongan terhadap Pemerintah Indonesia) yang mendukung Fretilin, meskipun pada hakikatnya gerakan tersebut bisa mengakibatkan renggangnya hubungan Australia dengan Indonesia. Kondisi demikian ini dimanfaatkan benar-benar oleh CIET dan Fretilin, sehingga dalam perkembangannya, Australia merupakan "basis" gerakan Fretilin untuk memusuhi gerakan-gerakan lainnya di Timor Timur yang ingin berintegrasi dengan Indonesia.

Sementara itu, tanggal 2 Desember 1975, Fretilin mengumumkan susunan "kabinetnya" yang sebenarnya hanya merupakan proforma saja. Karena pada saat itu apa yang dinamakan negara Republik Demokrasi Timor Timur sudah hampir tidak mempunyai wilayah kekuasaan lagi. Bahkan rakyat pendukung yang harus diurusnya pun praktis sudah tidak ada lagi.

Di lain pihak, gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, menjawab tantangan proklamasi sepihak Fretilin itu dengan suatu proklamasi tandingan, yang antara lain menyatakan bahwa: Pada hari ini tanggal 30 November 1975, di kota Balibo, partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista di Timor Portugis memproklamasikan wilayah Timor Portugis itu sebagai bagian dari Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak kemerdekaan wilayah itu oleh Fretilin (Proklamasi ini sebenarnya sudah diumumkan tanggal 29 November 1975, namun baru ditandatangani tanggal 30 November 1975).

Tanggal 3 Desember 1975, Menlu Adam Malik menyerahkan pernyataan keempat partai tersebut kepada Presiden Soeharto. Selanjutnya, tanggal 4 Desember 1975, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan sikapnya mengenai perkembangan terakhir di Timor Timur itu yang menyatakan antara lain:

- Tetap mendukung politik dekolonisasi Portugal yang harus berlangsung secara wajar, tertib dan damai;
- Sangat menyesalkan tindakan sepihak Fretilin yang menyatakan kemerdekaan Timor Timur tanpa menghiraukan partai-partai lainnya yang juga mewakili rakyat;
- Menghargai hak bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista, yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan menyatukan diri ke dalam negara Republik Indonesia;
- Semua pihak yang bersangkutan di Timor Portugis agar mengusahakan secara sungguh-sungguh tercapainya pelaksanaan dekolonisasi secara wajar,

- Akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara dan melindungi penduduk terhadap gangguan dari luar, serta berdasar atas asas anticolonialisme dan asas perikemanusiaan, pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi rakyat di wilayah Timor agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis;

- Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan rakyat yang berbatasan dengan wilayah Timor Portugis khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan.

Perlu diketahui, bahwa sebelum perkembangan masalah Timor Timur itu mencapai keadaan seperti tersebut di atas, perundingan bagi penyelesaiannya masih terus dilakukan. Antara lain adalah Pertemuan Roma yang berlangsung pada tanggal 1-2 November 1975, antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu Adam Malik, dan delegasi Portugal yang dipimpin oleh Menlu Mayor Melo Antunes. Pertemuan ini diadakan atas permintaan Portugal, yang tampaknya menyadari ketidakmampuannya untuk sendiri saja menyelesaikan masalah Timor Timur. Pertemuan tersebut mencapai kata sepakat antara lain mengenai masalah-masalah:

- Tetap diakuiinya kekuasaan Portugis atas wilayah tersebut;
- Perlunya segera diciptakan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bersengketa;
- Segera dikembalikannya sejumlah 56.000 orang pengungsi Timor Timur yang ada di wilayah Indonesia;
- Masalah 23 orang Portugis tawanan UDT, yang oleh Portugal dimintakan jasa-jasa baik Indonesia untuk mengusahakan pengembaliannya.

Namun demikian, Pertemuan Roma ini sebenarnya hanya merupakan penajagan dan penegasan sikap serta posisi masing-masing, yang ternyata bisa saling memakluminya. Di antaranya, seperti yang tercantum dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani tanggal 3 November 1975, yaitu:

- Pemerintah Indonesia menyetujui dan akan membantu terlaksananya rencana baru Pemerintah Portugal untuk mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai;
- Pemerintah Portugal tidak bersedia mengundang Indonesia untuk berpartisipasi secara militer dalam usaha pemulihan keamanan dan ketertiban, dengan alasan yang dikatakannya prinsipil;

- ling berkepentingan dalam masalah Timor Timur dan akan terus-menerus berkonsultasi dan bekerjasama dalam setiap usaha dan setiap tahap dalam proses dekolonisasi daerah tersebut;
- Pemerintah Portugal tidak ada niat untuk menginternasionalisasi masalah Timor Timur.

### PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR (PSTT)

Semangat yang tinggi merupakan modal utama dari pasukan gabungan Partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, sejak mereka memulai ofensifnya yang tidak tertahankan oleh Fretilin. Kota demi kota, daerah demi daerah berhasil mereka kuasai, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan gabungan yang dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan Indonesia itu berhasil menduduki dan menguasai Dili. Jalan menuju Dili ini menjadi terbuka lebar karena terjadinya perpecahan dalam tubuh Fretilin sendiri sebagai akibat dari kekurangsetujuan golongan sipil terhadap Proklamasi 28 November 1975 oleh golongan militer. Hal ini menyebabkan banyak pasukan Fretilin yang meninggalkan kesatuannya dan bergabung dengan pasukan gabungan.

Jatuhnya Dili, menyebabkan Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia dianggapnya melakukan invasi ke Timor Timur.

Sehari setelah jatuhnya Dili, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan sikapnya terhadap perkembangan baru tersebut, antara lain:

- a. Pemerintah Republik Indonesia tetap mendukung dekolonisasi Timor Portugis melalui proses yang wajar, tertib dan damai.
- b. Perkembangan di Timor Timur yang berlarut-larut telah mengganggu stabilitas di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya.
- c. Oleh karenanya penyelesaian masalah Timor Portugis bukanlah sekali-kali masalah ambisi teritorial RI.
- d. Memahami sedalam-dalamnya kehendak rakyat Timor Portugis yang sudah 400 tahun dijajah kolonial Portugis untuk merdeka.
- e. Sangat menyesalkan sikap Pemerintah Portugal untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia.
- f. Perkembangan keadaan di Timor Portugis, mengakibatkan "Memorandum Roma" praktis tidak dapat dilaksanakan lagi. Dengan demikian juga proses dekolonisasi yang tertib, wajar dan damai semakin sulit untuk dilak-

g. Pertempuran yang semakin menghebat, mengakibatkan meningkat jumlah korban tak berdosa. Dengan perkembangan itu, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada satu-satunya pilihan untuk tidak menahan hasrat sukarelawan-sukarelawan Indonesia guna membantu saudara-saudaranya membebaskan diri dari penindasan kolonial dan teror Fretilin.

h. Kehadiran sukarelawan Indonesia di wilayah Timor Portugis dilandasi pertimbangan, antara lain:

- Desakan rakyat Indonesia melalui pernyataan DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan konkrit dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis;

- Permintaan keempat partai Timor Portugis yang termuat dalam Pernyataan Penggabungan diri rakyat Timor Portugis dalam negara RI tanggal 30 November 1975.

Penjelasan seperti tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan kehadiran sukarelawan Indonesia di Timor Portugis, juga dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1975, untuk menerangkan duduk persoalannya kepada masyarakat internasional.

Sementara itu, tanggal 12 Desember 1975, dalam suatu upacara khidmat dan mengharukan di gedung DPRD Tingkat I NTT di Kupang, daerah Oekusi bekas jajahan Portugis telah menyatakan diri masuk menjadi daerah RI yang sekaligus semua penduduknya menjadi warga negara RI. Bertindak atas nama rakyat Oekusi adalah: Administrator Oekusi, Jaime dos Remedios de Oliveira; Komandan Militer Oekusi, Jose Valente; Sekretaris Parpol Apodeti setempat, Joao Martins Corbafio; Sekretaris Parpol UDT setempat, Joao Maniquin; Sekretaris Parpol Fretilin setempat, Sebastiao de Almeida. Pernyataan ini diterima dengan setulus hati oleh Gubernur NTT, El Tari, dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat di Jakarta untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pada tanggal 17 Desember 1975, partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista, atas nama rakyat seluruh Timor Timur menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Daerah Timor Timur, untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal rakyat Timor Timur dapat dipulihkan. Pernyataan ini ditandatangani oleh pimpinan Partai Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, dan pimpinan Partai UDT, Fransisco Xavier Lopez da Cruz.

Sementara itu, tokoh-tokoh tertentu di Portugal yang berpandangan lebih realistik pada masalah Timor Timur, seperti Jenderal Antonio Remalho Eanes (yang kemudian terpilih sebagai presiden), melalui Dubes Portugal di New

York, berhasil menghubungi delegasi PSTT yang sedang berada di sana dan mengusulkan untuk mengadakan perundingan mengenai masalah 23 orang Portugal tawanan PSTT. Setelah kontak-kontak berikutnya, perundingan diselenggarakan di Bangkok tanggal 16 Juni 1976.

Sebagai kelanjutan dari Pertemuan Bangkok tersebut, Portugal mengirimkan utusan khususnya yang terdiri dari suatu delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Morais da Silva, untuk berkunjung ke Timor Timur dan mengadakan pembicaraan dengan pihak PSTT di Dili. Ia merasa puas dengan keadaan Timor Timur yang semakin mantab dan bahwa eksistensi PSTT adalah nyata dan benar-benar telah menguasai keadaan.

Selanjutnya, kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi di Bangkok tanggal 6-10 Juli 1976. Perundingan ini antara lain berhasil merumuskan memorandum yang mencatat antara lain tentang kesanggupan Portugal untuk membayar gaji pegawainya yang belum sempat dibayar terhitung sejak Agustus 1975 sampai saat terjadinya integrasi secara yuridis Timor Timur dengan Republik Indonesia; dan melanjutkan pembiayaan proyek-proyek yang tertalar.

Karena belum mencapai sasarannya, Presiden baru Portugal Jenderal Antonio Remalho Eanes, mengirim lagi utusan khususnya Jenderal Morais da Silva untuk mengadakan perundingan dengan pihak PSTT di Bangkok tanggal 25 Juli 1976. Hasil perundingan ini antara lain menyebutkan bahwa PSTT menyetujui penyerahan 23 orang tawanan personal militer Portugal (yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 1976 melalui PMI, bersamaan dengan pengungsi Portugis lainnya. Morais da Silva menerima integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun perkembangan terakhir di Portugal sendiri telah terjadi berbagai pandangan mengenai status Timor Timur.

#### TIMOR TIMUR PROPINSI KE-27

Proklamasi Balibo 30 November 1975 merupakan sumber dan landasan tata hukum baru yang ditegakkan oleh gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista. Oleh karena itu adalah suatu konsekuensi logis kalau bertolak dari proklamasi itu gerakan gabungan lantas membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) tanggal 17 Desember 1975 yang kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur berdasarkan Act No. 1/AD, 1976.

Kedua lembaga tinggi itu sengaja dibentuk untuk melengkapi aparat penyelenggara dan penerjemah wadah bagi penampungan kehendak rakyat

secara obyektif. Dengan demikian, tuntutan Indonesia agar keinginan rakyat dilegalisasi terlebih dahulu, dapat dipenuhi, yang sekaligus berarti memenuhi tuntutan tata-krama politik internasional, yang menghendaki penentuan masa depan Timor Timur didasarkan atas kehendak rakyat di wilayah itu sendiri.

Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Wilayah Timor Timur yang dipilih dan terpilih sesuai dengan asas-asas demokrasi tradisional yang khas mengikuti adat kebiasaan Timor Timur, melangsungkan sidang paripurna terbuka untuk menentukan masa depan Timor Timur. Sidang yang dipimpin Ketua DPR Guilherme Maria Goncalves, dihadiri lengkap oleh 30 anggotanya (yang mewakili 13 kabupaten plus ibukotanya), para undangan yaitu Kepala Eksekutif, Arnaldo dos Reis Araujo, dan wakilnya, Lopez da Cruz, dan para perwakilan negara-negara sahabat, para wartawan luar negeri.

Sidang Paripurna Terbuka DPR tersebut, dengan acara tunggal membahas integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia, berhasil menelorkan keputusan yang diterima secara aklamasi yaitu petisi untuk mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dilaksanakannya integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk merealisasikan keputusan sidang paripurna DPR tersebut, tanggal 5 Juni 1976, suatu delegasi besar rakyat Timor Timur yang terdiri dari 41 orang yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif PSTT, Arnaldo dos Reis Araujo, tiba di Jakarta dengan tujuan menyampaikan Petisi Rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1976, delegasi telah menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka untuk menyerahkan petisi tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan akan mengirim suatu team yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, DPR dan berbagai kalangan organisasi masyarakat untuk sekali lagi menyaksikan kemauan dan hasrat rakyat Timor Timur sebelum daerah itu secara resmi bergabung dengan RI. Hal ini dilakukan bukan karena Pemerintah Indonesia tidak percaya dengan Proklamasi Balibo, atau petisi yang diterimanya, atau ragu-ragu terhadap para pemimpin rakyat Timor Timur, akan tetapi dimaksudkan agar rakyat Indonesia dapat menyaksikan sendiri dan berbicara sendiri dari hati ke hati dengan saudara-saudaranya di Timor Timur.

Dan pada tanggal 24 Juni 1976, delegasi Pemerintah RI yang berjumlah 36 orang (termasuk 9 dari DPR-RI, dan masing-masing 1 orang dari KNPI, HKTI, FBSI, HNSI dan PGRI) dan dipimpin oleh Mendagri Amirmachmud, tiba di Dili untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya yang berhubungan dengan kehendak rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan rakyat Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga delegasi



juga disertai beberapa perwakilan asing dan para wartawan, telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang memuaskan dan kembali ke Jakarta.

Selanjutnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Juni 1976 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, setelah mendengar laporan Ketua Delegasi ke Timor Timur tersebut di atas, berkesimpulan bahwa Petisi PSTT/DPR Timor Timur yang diterimanya tanggal 7 Juni 1976 dari delegasi rakyat Timor Timur memang mencerminkan keinginan rakyat Timor Timur. Atas dasar kesimpulan tersebut Presiden memutuskan:

- a. Menanggapi positif dan menerima pernyataan integrasi rakyat Timor Timur;
- b. Pelaksanaan integrasi akan dilaksanakan melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan proses konstitusional;
- c. Dalam waktu singkat, Pemerintah RI akan mengajukan RUU Khusus tentang penerimaan/penggabungan Timor Timur ke wilayah RI agar dapat disahkan oleh DPR;
- d. Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, Presiden RI menginstruksikan supaya semua instansi di lingkungan RI membantu rakyat Timor Timur dalam melaksanakan pembangunan di Timor Timur.

Rancangan Undang-Undang tersebut di atas beserta penjelasannya diajukan kepada DPR-RI tanggal 1 Juli 1976. RUU yang digarap sejak tanggal 12 Juli dalam lobbying Komisi II tidak banyak mengalami perubahan prinsipial, dan hanya diadakan perubahan redaksional saja. RUU tersebut terdiri dari empat pasal. Pasal 1 berbunyi: "Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;" Pasal 2: "Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya bekas koloni Portugis di Timor;" Pasal 3 berbunyi: "Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kedua ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan tersendiri dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di Timor Timur. Sedangkan pasal 4 menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada waktu diundangkan.

Pada tanggal 15 Juli 1976, melalui sidang plenonya, DPR secara aklamasi telah menyetujui disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976).

Selanjutnya, dengan ditandatanganinya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tersebut oleh Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 17 Juli 1976

maka bagi bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Timor Timur khususnya berarti telah selesailah proses integrasi. Dan dengan statusnya sebagai propinsi RI yang ke-27 maka pada tanggal 3 Agustus 1976, dengan didahului lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menggema di gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, Dili, Mendagri Amirmarchmud melantik Gubernur pertama Timor Timur, Arnaldo dos Reis Araujo, dan wakilnya, Francisco Xavier Lopez da Cruz, serta Ketua DPR Tingkat I dan wakilnya serta 36 anggotanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- The Age* (Melbourne), berbagai penerbitan.
- Asian Wall Street Journal*, berbagai penerbitan.
- The Australian*, berbagai penerbitan.
- Bandoro, Bantarto, "The East Timor Issue at the United Nations," *Indonesian Quarterly*, vol. XI, no. 1 (January 1983).
- Carrascalao, Mario viegas, Gubernur Timor Timur. Beberapa interview selama tahun 1985.
- Kliping berbagai surat kabar Indonesia, Koleksi CSIS.
- da Cruz, Lopez, Pemimpin Partai UDT. Beberapa interview selama tahun 1985.
- East Timor: A Decade of Development*. Dili: Provincial Government of East Timor, 1985.
- East Timor Develops*. Dili: Provincial Government of East Timor, 1985.
- Far Eastern Economic Review*, berbagai penerbitan.
- Hastings, Peter, "The Timor Problem-III: Some Australian Attitudes, 1941-1950," *Australian Outlook*, December 1975.
- Lapian, A.B. dan Abdurachman, Paramita, "Sejarah Timor Timur," *Berita Antropologi*, th. XI, no. 36 (Januari-Maret 1980).
- Nicol, Bill. *Timor: The Stillborn Nation*, Melbourne: Widescope International, 1978.
- Noor, Machmuddin et. al., *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Jakarta: Alda, 1977.
- News Weekly* (Melbourne), berbagai penerbitan.
- Soekanto, *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Jakarta: Yayasan Parikesit, 1976.
- Sydney Morning Herald*, berbagai penerbitan.
- Weatherbee, Donald E. "The Indonesianization of East Timor," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 3, no. 1 (June 1981).
- Viviani, Nancy, "Australians and the Timor Issue," *Australian Outlook*, vol. 30, no. 2 (August 1978).